

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Semakin banyaknya perusahaan besar yang mengalami masalah kebangkrutan seperti Enron dan WorldCom, serta terjadinya krisis keuangan global di tahun 2008 menjadi faktor pendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan penerapan sistem manajemen risikonya. Selain berfokus pada risiko yang mengancam profitabilitasnya, perusahaan juga harus mempertimbangkan risiko yang mengancam eksistensinya. Lingkungan perusahaan yang berkembang pesat juga mengakibatkan makin kompleksnya risiko bisnis yang harus dihadapi perusahaan. Berbagai profil risiko yang dihadapi perusahaan saat ini berbeda dengan profil risiko pada dekade sebelumnya (Beasley, Pagach, & Warr, 2007). Perubahan teknologi, globalisasi, dan perkembangan transaksi bisnis menyebabkan makin tingginya tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola risiko yang harus dihadapinya (Beasley, Pagach, & Warr, 2007). Akibatnya, untuk menghadapi segala tantangan tersebut, penerapan sistem manajemen risiko secara formal dan terstruktur merupakan suatu keharusan bagi perusahaan. Apabila dilaksanakan dengan efektif, sistem manajemen risiko dapat menjadi sebuah kekuatan bagi pelaksanaan *good corporate governance*. Aspek pengawasan merupakan kunci penting demi berjalannya sistem manajemen risiko perusahaan yang efektif. Dewan komisaris berperan dalam mengawasi penerapan manajemen risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program manajemen risiko yang efektif (Krus, Orowitz, Nadler, & Krupp, 2009).

Beberapa tahun lalu pengungkapan risiko masih bersifat sukarela, khususnya yang berkaitan dengan instrumen finansial (Fathimiyah, Zulfikar, & Fitriyani, 2012). Di Indonesia, pengungkapan risiko keuangan di Indonesia diatur dalam PSAK Nomor 60 Revisi 2014 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang mengadopsi IFRS Nomor 7 tentang *Financial Instrument: Disclosures*. Selain diatur dalam PSAK Nomor 60, instrumen keuangan juga diatur dalam PSAK Nomor 50 Revisi 2014 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian serta PSAK Nomor 55: Revisi 2014 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Berdasarkan pernyataan dalam PSAK Nomor 50, instrumen keuangan merupakan setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan dan liabilitas keuangan atau instrument keuangan entitas lain (Wibowo & Probohudono, 2017).

Pentingnya pelaporan terhadap risiko telah dimulai awal tahun 1998 dan fokus dalam *risk disclosure* meningkat sejak munculnya *introduction* IFRS 7, 1 Januari 2007. Di tahun 2007 dunia dilanda krisis keuangan internasional yang disebut krisis kredit dan saat itu ketertarikan terhadap pengungkapan risiko pun semakin meningkat. Peraturan mengenai *risk disclosure* dikuatkan munculnya Basel II. Di Indonesia, penerapan Basel II telah diwajibkan oleh Bank Indonesia, dimana seluruh bank umum di Indonesia diharapkan sudah bisa menerapkan Basel II pada tahun 2008, meskipun dalam lingkup internasional, bank-bank dunia kan menerapkan Basel II secara penuh pada awal 2007. Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan dengan menitik beratkan pada perhitungan permodalan

yang berbasis risiko, *supervisory review process*, dan *market discipline*. (Fathimiyah et.al, 2012).

Perusahaan di Indonesia yang semakin berkembang masih banyak menghadapi masalah-masalah yang apabila diamati, penyebabnya adalah lemah dan tidak diterapkannya *corporate governance* dengan baik. Tentu saja hal ini menyebabkan industri tidak dapat secara berhati-hati dalam mengelola tingkat resiko yang dihadapi. Lemahnya penerapan *good corporate governance* di Indonesia disebabkan oleh lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) yang belum mapan, serta terabaikannya hak minoritas. Sejak saat itulah, baik pihak pemerintah maupun pihak investor mulai memberikan perhatian yang lebih dalam praktek *corporate governance*. (Kusumawati & Riyanto, 2005). Harus dipahami bahwa persaingan global bukanlah persaingan antarnegara melainkan persaingan antarkorporat yang ada pada negara-negara tersebut. Jadi keberhasilan perekonomian suatu negara bergantung pada korporat masing-masing. Pemahaman tersebut membuktikan bahwa korporat kita belum dikelola secara baik (Taufik & Prijati, 2016).

Salah satu bentuk mekanisme *corporate governance* adalah dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan corporate governance di Indonesia. Tugas utama dewan komisaris adalah memberikan arahan serta mengawasi tindakan yang dilakukan oleh dewan direksi agar sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Salah satu keinginan pemegang saham adalah tersedianya informasi mengenai risiko keaungan sehingga pemegang saham dapat

membuat keputusan yang tepat. Keberadaan dewan komisaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Wibowo & Probohudono, 2017). Achmad, Faisal, & Oktarina (2017) menyatakan bahwa komisaris yang independen dapat memberikan kontribusi yang substansial untuk keputusan penting perusahaan. Selain independensi, karakteristik penting dari dewan komisaris adalah tingkat kompetensi atau keahlian profesional dan latar belakang pendidikan formal anggota dewan komisaris merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kemampuan dewan komisaris dalam mengambil keputusan dan menjalankan fungsinya dalam perusahaan (Gray & Nowland, 2014). Namun, penelitian mereka gagal memberikan bukti empiris yang signifikan terkait pengaruh positif independensi dan tingkat kompetensi dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Sebaliknya, hasil penelitian Htay, Rashid, Adnan, & Meera (2011) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Semakin tinggi tingkat keahlian profesional dewan komisaris dalam bidang hukum, ekonomi dan bisnis maka semakin baik kemampuan mereka untuk mengidentifikasi masalah risiko yang relevan yang spesifik bagi perusahaan (Buckby, Gallery, & Ma, 2015). Sedangkan Falendro, Faisal, & Ghozali (2018) membuktikan dewan dan komite audit belum sepenuhnya menjelaskan peran mereka dalam meningkatkan transparansi, terutama dalam mengkomunikasikan risiko perusahaan.

Pengungkapan resiko juga dapat dipengaruhi oleh budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan sekumpulan nilai yang dijadikan acuan atau kebiasaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban di lingkup perusahaan. Camerom & Quinn (1999)

membagi budaya perusahaan menjadi empat kelompok yaitu budaya *clan*, budaya *adhocracy*, budaya *market* dan budaya *hierarchy*. *Organizational culture* berperan sebagai fondasi yang solid dari terbentuknya hubungan manajer (agent) dan pemilik perusahaan (principle). Teori keagenan menyatakan konflik yang terjadi antara manajer dan pemilik perusahaan terbentuk karena adanya *organizational culture*. Penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat mengurangi *agency cost* yang timbul dari adanya konflik tersebut. Dengan demikian, *organizational culture* memiliki peran dalam praktik manajemen, termasuk pengungkapan dan pengawasan (Wibowo & Probohudono, 2017).

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian ulang (*replica*) dari penelitian Wibowo & Probohudono (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan obyek penelitian yang berbeda yaitu perusahaan manufaktur dalam periode 2015-2017 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan umum di Kompas100 BEI dalam periode 2013-2015. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan pengelola sumber daya yang melakukan kegiatan transaksi ekonomi dengan banyak pihak yaitu *stakeholder* (pemasok, kreditur, konsumen dan investor). Perusahaan yang aktivitas ekonominya berhubungan dengan banyak pihak akan menimbulkan banyak risiko sehingga diharapkan berhubungan dengan pengungkapan risiko yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan meneliti lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris apakah teori yang sama namun dengan aplikasi, populasi,

waktu dan tempat yang berbeda akan memberikan hasil yang sama dengan mengangkat judul “*Board of Commissioners, Organizational Culture, dan Financial Risk Disclosure di Indonesia (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah latar belakang pendidikan dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, dan komisaris independen berpengaruh terhadap *Financial Risk Disclosure*?
2. Apakah *organizational culture* yang terdiri dari *clan culture, Adhocracy Culture, market culture, Hierarchy Culture* berpengaruh terhadap *Financial Risk Disclosure*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, dan komisaris independen terhadap *Financial Risk Disclosure*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *organizational culture* yang terdiri dari *clan culture, Adhocracy Culture, market culture, Hierarchy Culture* terhadap *Financial Risk Disclosure*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait antara lain:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu akuntansi dalam hal pemahaman tentang pengaruh dewan komisaris dan *organizational culture* terhadap *Financial Risk Disclosure*.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan dalam memahami pengaruh dewan komisaris dan *organizational culture* terhadap *Financial Risk Disclosure*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Penjelasan isi lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendukung penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang berisi tentang variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, pengolahan data dan pengujian hipotesis.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan data khusus yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang telah ditentukan berdasarkan alat dan langkah analisis sehingga akan membawa ke tujuan dan sasaran penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan memuat secara singkat mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada berbagai pihak.